

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya era reformasi. Akuntansi sektor publik adalah suatu metode akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Di era saat ini praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga publik mendapat perhatian yang besar, baik pada akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Masyarakat menuntut agar mengelola keuangannya secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Perkembangan Anggaran sektor publik di Indonesia terjadi setelah dilakukannya reformasi sektor publik di berbagai Negara. Anggaran yang pertama diterapkan adalah Line Item Budgeting atau sering disebut anggaran tradisional, pada anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input yang digunakan dan kelemahan dari anggaran ini yaitu tidak ada mengaitkan input dengan output sehingga anggaran ini berfokus dengan input tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektifitas program. Kedua, Incremental Budgeting yaitu penganggaran yang hanya menambah dan mengurangi jumlah anggaran dari tahun sebelumnya yang digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya. Ketiga, Planning Programming Budgeting System yaitu sistem penganggaran yang disusun hanya berdasarkan program kerja. Keempat yaitu Zero Based Budgeting yang merupakan penganggaran yang berbasis nol atau dimulai dari nol. Kelima yaitu Performance Based Budgeting yang merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan

hubungan antara input dengan output serta outcome yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Mauro, dkk, 2017).

Pemerintahan Indonesia saat ini sudah menerapkan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting). Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program, serta anggaran berbasis kinerja dapat menyatukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan agar terlihat hubungan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan (Akbar, 2018).

Pemerintah Kota Kupang adalah salah satu pemerintahan daerah yang sudah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dengan pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, setiap biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan harus memiliki hasil dan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat. Selain itu Pemerintah Kota Kupang harus menunjukkan akuntabilitas dengan melaporkan hasil dari kegiatan yang dilakukan dan menyampaikan informasi dengan transparan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan ruang atau tempat agar publik dapat mengakses dokumen publik dengan mudah.

Kelangsungan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran, semakin baik pengelolaan anggaran maka kelangsungan kesejahteraan masyarakat semakin baik juga. Pengelolaan anggaran yang baik harus dilakukan dengan pengawasan oleh atasan langsung pengguna anggaran tersebut, badan legislatif serta pengawas khusus yang bertugas mengatur perencanaan dan pengendalian

anggaran. Pengawasan harus dilakukan untuk mengontrol setiap anggaran yang disusun agar dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengelolaan anggaran yang baik mutlak dilakukan dan merupakan prinsip *Value for Money*. Penerapan prinsip *Value for Money* diharapkan dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* bertujuan untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam pengalokasian sumber daya, penggunaan sumber daya yang efisien dengan hasil yang optimal serta efektifitas dalam penggunaan sumber daya. *Value for Money* dinilai baik apabila pemerintah sudah menggunakan *input* seminimal mungkin untuk mencapai *output* yang maksimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan anggaran berkaitan dengan *Value for Money* karena masih banyak pengelolaan anggaran yang belum dilakukan secara ekonomis (menggunakan biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros). SKPD merupakan elemen-elemen dari sektor publik yang selalu diamati terkait dengan pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Salah satunya dapat terlihat pada pembangunan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Medan tetapi tidak fungsional dalam pemanfaatannya. Minimnya proporsi RTH pada Kota Medan semakin menjelaskan bahwa pemanfaatan anggaran tidak efisien dengan hasil yang minum dan anggaran yang boros.

SKPD-SKPD ini dituntut untuk meningkatkan pelayanan melalui pelaksanaan *Value for Money* dalam menjalankan atau melaksanakan setiap programnya. Setiap SKPD harus dapat mengatasi hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak

terlaksana berdasarkan pada *Value for Money*. *Value for Money* harus diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam kerangka otonomi daerah, *Value for Money* merupakan pengantar untuk Pemerintah Daerah mencapai Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada masa sekarang ini fenomena yang terjadi pada pengelolaan anggaran adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dasar yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap keseluruhan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan informasi, dimana seluruh proses pemerintahan, perlu diketahui dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat tercipta dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk dari akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam pelayanan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP), hal ini dapat dilihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999. Keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP).

Akan tetapi, berbagai masalah muncul yang kemudian menghambat lajunya pembangunan. Seperti yang dialami pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang kurang potensial baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi hambatan- hambatan yang terjadi pada masing-masing daerahnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan yang muncul adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Sistem pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari perencanaan penggunaan anggaran (Natalia, dkk, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah memberikan kesempatan bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Akuntabilitas menjadi tolak ukur kinerja dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Sedangkan dengan adanya transparansi, masyarakat dapat menjadi lebih cermat dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Selain itu, dengan transparansi masyarakat berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah.

Meskipun sistem anggaran sudah mengalami perubahan yang sangat baik dengan diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja, namun dalam penerapannya bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Anggaran yang ditargetkan tidak ada yang terealisasi sesuai dengan yang dianggarkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ‘ ‘ Pengaruh Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti membuat perumusan masalah dari Penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka rumusan persoalan penelitian adalah:

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan ?
2. Apakah Akuntabilitas Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Anggaran terhadap Kinerja Keuangan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi selain itu penulis juga punya keinginan untuk mengetahui transparan dan akuntabilitas Pemerintah

Sehingga menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran terhadap kinerja keuangan. Juga sebagai referensi bagi peneliti lanjutan paling tidak sebagai bahan acuan dalam menganalisis masalah yang sama.

### **1.5.2 Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran terhadap kinerja keuangan